



05

Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Sebagai Penyangga Sumber Kehidupan

Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor - 05

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor) – Tim Lingkungan

Jhon Roy Sirait, Imran Tumora, I Gusti Made Kusuma Harja, Elissa Dwiyantri, Atiek Widayati

Desember – 2016

Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Sebagai Penyangga Sumber Kehidupan Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur

Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor - 05

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor) – Tim Lingkungan

Jhon Roy Sirait, Imran Tumora, I Gusti Made Kusuma Harja, Elissa Dwiyantri, Atiek Widayati

World Agroforestry Centre (ICRAF)
December 2016

Sitasi

Sirait JR, Tumora I, Harja IGMK, Dwiyantri E, Widayati A. 2016. *Pengelolaan daerah tangkapan air sebagai penyangga sumber kehidupan. Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur*. Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor – 05. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada (sebelumnya dikenal dengan nama Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada). Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre.

Website: www.worldagroforestry.org/agforsulawesi

Hak cipta

The World Agroforestry Centre (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa merubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan.

Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan ICRAF, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggungjawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silahkan menambah link ke situs kami www.worldagroforestry.org pada situs anda atau publikasi.

Ucapan terima kasih kepada

Dinna Tazkiana, Endri Martini, Hasantoha Adnan, Hendra Gunawan, Janudianto, Mahrizal, Ni'matul Khasanah, Subekti Rahayu, Amy Lumban Gaol, Tim Kerja Pengelolaan Bersama Poli-Polia

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
<http://www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia>
blog.worldagroforestry.org

Foto sampul: Jhon Roy Sirait

Desember - 2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
1. Pendahuluan	1
1.1. Strategi Penghidupan dan Konservasi	1
1.2. Lingkup Kerja	2
2. Poli-Polia dan Mata Pencarian di Sekitarnya	2
2.1. Kondisi Hutan di Sekitar Poli-Polia	2
2.2. Sumber Penghidupan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat	3
2.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Sekitar Wilayah Kerja	4
2.4. KKPA/SWOT dan Isu Utama	5
3. Strategi Konservasi dan Penghidupan	6
3.1. Visi dan Misi	6
3.2. Mitra Langsung dan Mitra Strategis	6
3.3. Target Capaian	7
3.4. Penanda Kemajuan	7
4. Rancangan dan Prosedur Pemilihan Lokasi Implementasi	8
4.1. Seleksi Desa	9
4.2. Pemilihan Lokasi Penanaman	9
4.3. Skema yang Potensial	13
5. Tinjauan Kegiatan Lanjutan	14
6. Penutup	14
7. Referensi	15
Lampiran 1. Kelompok Kerja (pokja) Klaster Poli-Polia	16
Lampiran 2. Hasil Identifikasi Data Lapangan dan Sosialisasi	21

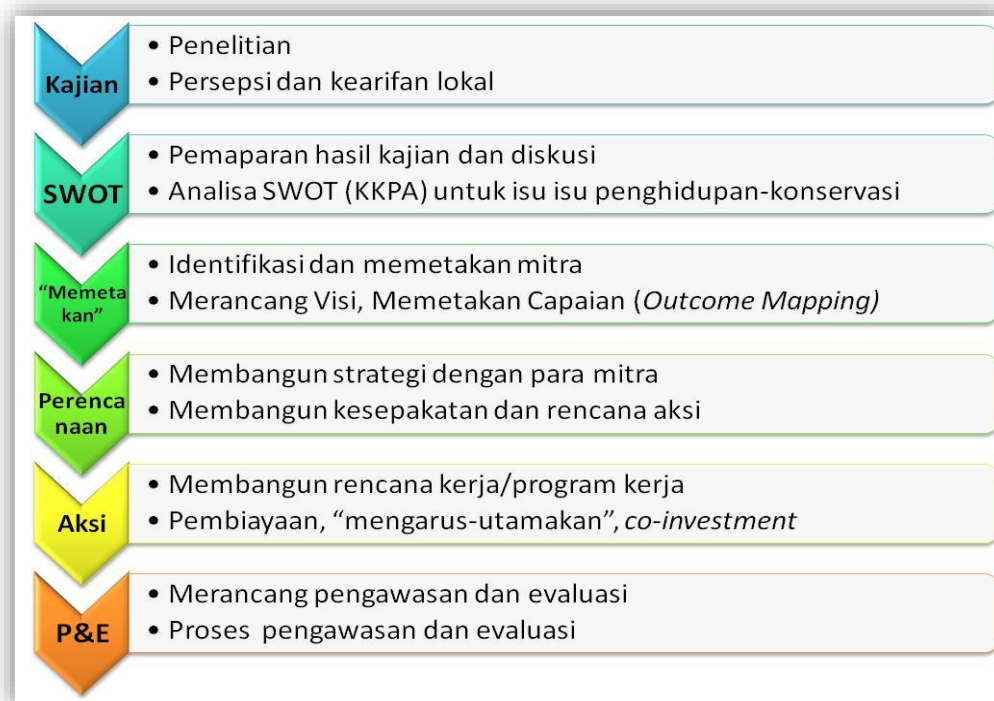
1. PENDAHULUAN

1.1. STRATEGI PENGHIDUPAN DAN KONSERVASI

Penghidupan yang berbasis sumber daya hutan banyak ditemui di wilayah pedesaan di Indonesia yang berbatasan dengan hutan atau kawasan hutan. Untuk memastikan kelestarian sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya hutan tersebut, maka perlu adanya usaha konservasi. Aspek pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam harus dibahas secara menyeluruh yang memperhatikan aspek penghidupan masyarakat dan berdasarkan strategi dan perencanaan yang memasukkan ke dua aspek tersebut.

Sebagai bagian dari program Agroforestry and Forestry (AgFor) di Sulawesi, persoalan penghidupan masyarakat yang berbasis pemanfaatan SDA mendapat perhatian penting dan persoalan ini dikaji dengan seksama agar dapat memberikan kontribusi pada kelestarian lanskap hutan dan agroforestri.

Oleh karena itu, dikembangkanlah strategi yang disebut sebagai “strategi penghidupan dan konservasi” sebagai landasan untuk AgFor dan para mitranya dalam mengatasi persoalan yang melibatkan aspek penghidupan dan pemanfaatan SDA. Di dalam AgFor, pendekatan untuk membahas persoalan penghidupan-konservasi ini mengikuti langkah-langkah “dari kajian ke aksi”, seperti yang dijelaskan dalam Gambar 1. Proses pembangunan strategi ini memastikan adanya prinsip ‘partisipatif dan inklusif’, yang mengutamakan kemitraan dengan pelaku dan pemangku kepentingan terkait di wilayah kerja.

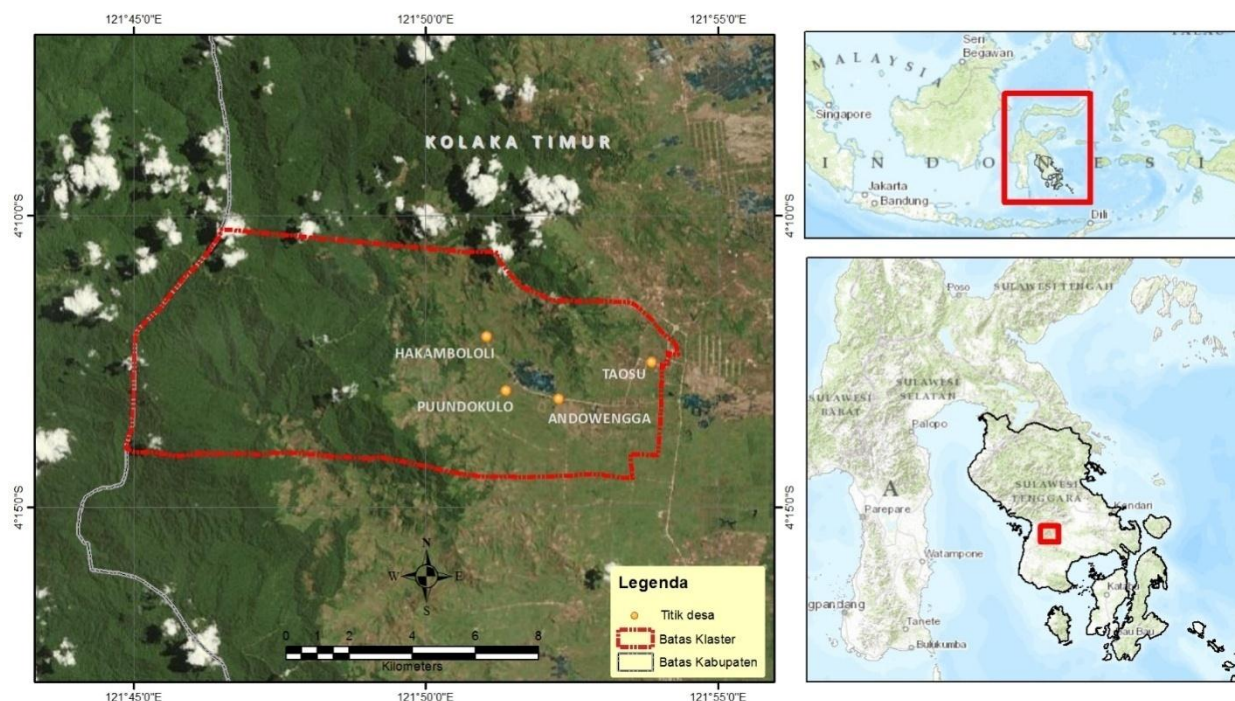


Gambar 1. Pendekatan umum dalam proses pembangunan strategi penghidupan-konservasi dalam AgFor

1.2. LINGKUP KERJA

Daerah tangkapan air (DTA) Andowengga adalah bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Konawehea, di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ruang lingkup kerja strategi ini mencakup Klaster Desa di Kecamatan Poli-Polia, yang terdiri dari Desa Andowengga, Puundokulo, Hakambololi, dan Taosu, di Kabupaten Kolaka (Gambar 2). Tahun 2012, Kabupaten Kolaka mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, dan Kecamatan Poli-Polia termasuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Secara geografis, Klaster Desa Poli-Polia (disingkat sebagai Klaster Poli-Polia) terletak di dataran rendah, yang umumnya berupa persawahan dengan sumber air dari Sungai Andowengga. Bagian dataran tinggi dari klaster ini umumnya ditanami coklat, merica, cengkeh, dan jati.



Gambar 2. Lokasi Kecamatan Poli-Polia dan empat desa (Klaster Desa Poli-Polia)

Luas wilayah Klaster Poli-Polia sekitar 81,1 km² atau 54% dari total luas wilayah kecamatan Poli-Polia (152,4 km²) (Gambar 2). Wilayah hutan di Poli-Polia berada di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Ladongi Unit XII Ladongi yang luasannya sekitar 55.727 ha. Di wilayah KPHP Unit XII Ladongi yang menjadi bagian Klaster Poli-Polia terdapat penduduk yang bermukim di dalam kawasan tersebut dan ada yang di luar kawasan hutan atau di desa. Terdapat tiga kelompok tani hutan (KTH) yang sudah dibina oleh Dinas Kehutanan Kolaka Timur pada tahun 2009 yaitu KTH Bina Mahawana, KTH Taruna Tani, dan kelompok wanita tani hutan (KWTH). Untuk kelompok KWTH ini kegiatannya adalah kerajinan tangan dari hasil kebun dan hutan.

2. POLI-POLIA DAN MATA PENCAHARIAN DI SEKITARNYA

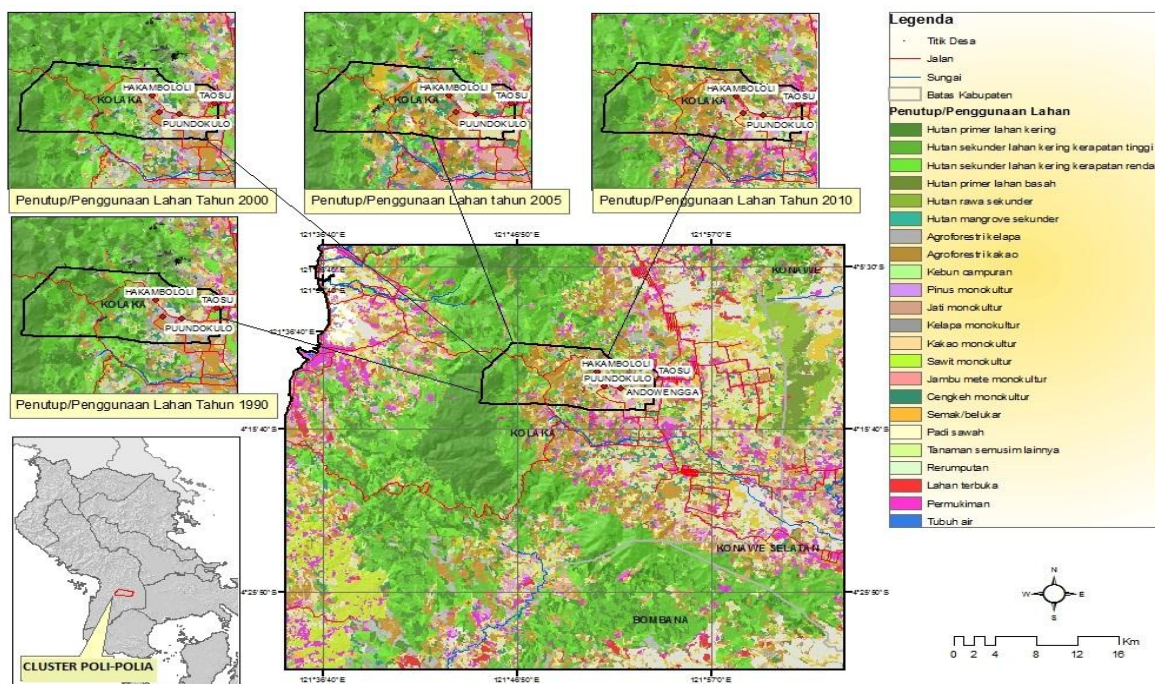
2.1. KONDISI HUTAN DI SEKITAR POLI-POLIA

Poli-Polia berada di ketinggian 25-500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan topografi landai. Tutupan lahannya berupa hutan, semak, alang-alang, dan kebun masyarakat. Kekayaan flora Poli-Polia antara lain: *Eha* (*Castanopsis buruana* Bl.), Aren, Kalapi (*Kalapia celebica*), Bolongita (*Tetrameles nudiflora* R. BR.),

Pondo (*Buchanania arborescens* BL.). Terdapat beberapa jenis satwa liar di Poli-Polia, seperti Anoa (*Bubalus depressicomis* Smith.), Rusa (*Cervus timorensis* Muller dan Schlege), Kus-kus (*Phalanger spp.*), Monyet (*Macaca mculata fasciolaris Rafles*), Merpati Hutan (*Turcoena manadensis*), dan ular phyton.

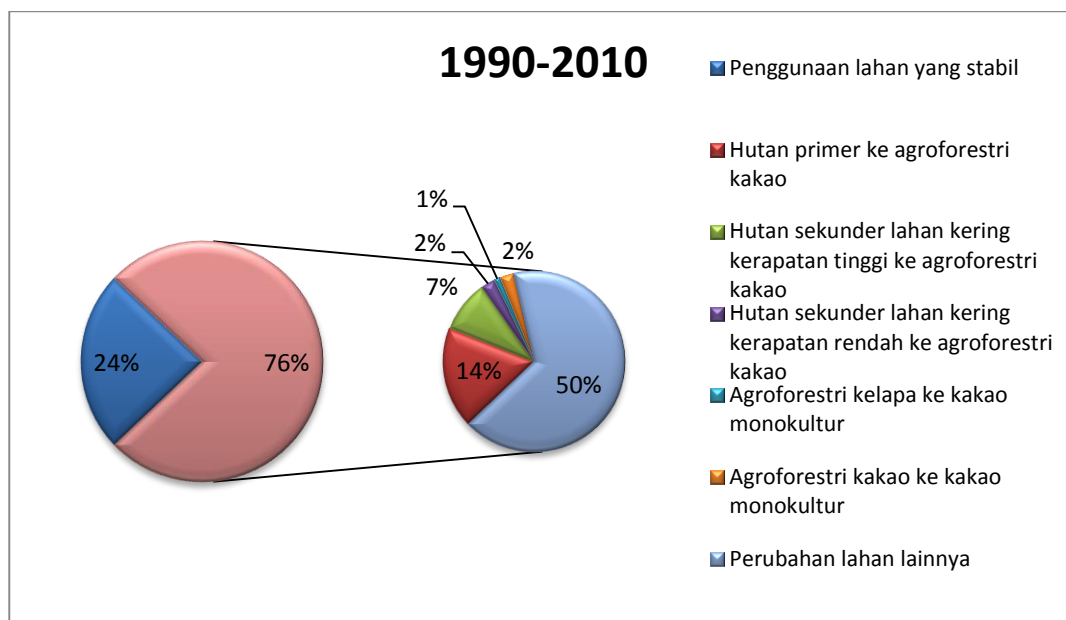
2.2. SUMBER PENGHIDUPAN DAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT

Tutupan lahan yang tertinggi adalah hutan, sementara jenis tutupan lahan utama lainnya adalah kebun coklat campur (agroforestri kakao) dan coklat monokultur (kakao monokultur). Luasan hutan tidak terganggu mengalami penurunan kurang lebih 65% dari tahun 1990 (5.146 ha) sampai 2000 (1.775 ha), dan terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, luasan kebun coklat mengalami peningkatan secara substansial selama dua dekade pengamatan, khususnya agroforestri coklat dengan luas area dari 608 ha pada tahun 1990 menjadi 2.800 ha pada tahun 2010. Selain itu, kebun pinus monokultur dan kebun jati monokultur yang tidak ditemukan di tahun 1990 tumbuh pesat antara tahun 2005-2010 masing-masing area seluas 309 ha dan 226 ha.



Gambar 3. Peta perubahan penggunaan dan tutupan lahan tahun 1990-2010

Sebanyak 24% lahan cukup stabil sedangkan 76% lahan beralih fungsi (Gambar 4). Area tutupan lahan yang secara umum menunjukkan kenaikan adalah coklat dan pinus (lihat Tabel 1). Dalam kurun waktu 1990-2010, jenis trajektori perubahan lahan dengan persentase terbesar adalah dari hutan primer ke agroforestri kakao (14%) dan dari hutan sekunder ke agroforestri kakao (7%).



Gambar 4. Alur perubahan penggunaan dan tutupan lahan dominan

Tabel 1. Ringkasan perubahan penggunaan dan tutupan lahan tahun 1990-2010

Kelas Penutup/Penggunaan Lahan	1990	2000	2005	2010
Hutan primer lahan kering	3481	2725	2382	1746
Hutan sekunder lahan kering kerapatan tinggi	2675	3065	3127	3021
Hutan sekunder lahan kering kerapatan rendah	500	516	415	449
Kebun kelapa campur	301	376	418	180
Kebun coklat campur	541	683	713	954
Kebun campuran	34	50	2	25
Pinus monokultur		100	114	549
Jati monokultur			5	74
Kelapa monokultur	45	43	59	13
Coklat monokultur	169	205	60	419
Sawit monokultur				80
Jambu mete monokultur	41	54	55	6
Cengkeh monokultur	43	135	325	167
Semak/belukar	65		98	117
Sawah dan tanaman semusim	17	6	105	50
Rumput dan lahan terbuka	57	3	18	12
Permukiman	47	49	114	148
Total	8016	8010	8010	8010

2.3. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI SEKITAR WILAYAH KERJA

Jasa lingkungan merujuk pada jasa yang disediakan oleh proses dan fungsi ekosistem, yang dapat mencakup tiga fungsi jasa: penyediaan, regulasi atau pengatur, dan pendukung. Jasa-jasa ini dapat dimanfaatkan oleh manusia langsung dari tempat jasa tersebut diproduksi atau secara tidak langsung, melalui beragam proses alamiah dan proses buatan manusia. Jasa lingkungan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu: air, keanekaragaman hayati, biomassa/cadangan karbon, tanah, dan keindahan alam. Untuk DTA Andowengga di Kecamatan Poli-Polia, jasa lingkungan utamanya adalah sumber daya air yang digunakan masyarakat luas.

Sumber air utama untuk rumah tangga adalah mata air yang berada di beberapa titik di DTA Poli-Polia. Selain mata air, sumber air lainnya yang dimanfaatkan oleh warga desa adalah sungai, sumur, dan penampungan air (embung).

2.4. KKPA/SWOT DAN ISU UTAMA

Analisa *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*) adalah analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, atau disingkat sebagai KKPA. Analisa KKPA biasanya diaplikasikan untuk mengidentifikasi hal hal positif dan negatif dari suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat, berdasarkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternalnya (peluang dan ancaman). Analisa KKPA ini dikembangkan untuk mengetahui situasi yang ada dan dapat membantu perencanaan strategis serta pengambilan keputusan.

Analisa KKPA dilakukan di suatu kelompok desa untuk mengetahui perspektif penduduk desa mengenai Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman di hamparan mereka. Dalam menganalisa Kekuatan dan Kelemahan, kategorisasi dilakukan berdasarkan: sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi fisik/infrastruktur, sumber daya ekonomi/kehutanan, dan modal sosial/kelembagaan. Sedangkan untuk analisa Peluang dan Ancaman, tidak dilakukan kategorisasi. Hasil analisa KKPA menjadi masukan untuk mengetahui isu utama dan cara untuk mengembangkan dan memecahkan isu tersebut. Hasil identifikasi KKPA untuk Klaster Poli-Polia dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil KKPA/SWOT di Klaster Poli-Polia

Kekuatan	Kelemahan
Sungai sebagai sumber air	Akses ke sumber air dan lahan rendah
Tanah yang subur	Kualitas jalan buruk
Hasil hutan	Pengetahuan pertanian rendah
KTWH/GAOKTAN sebagai wadah kelompok tani	Hama dan penyakit
Keahlian kelompok tani	Kelompok tani yang lemah
Program penyuluhan yang kuat	Gotong royong lemah
Jumlah usia produktif	Akses ke modal rendah
Arisan simpan pinjam	Tidak ada koperasi
Pendidikan tinggi	Tingkat pengangguran tinggi
Kondisi jalan yang baik	Fasilitas listrik belum lengkap
Peluang	Ancaman
Koperasi dan pemasaran	Penebangan liar
Pembangunan ekowisata	Banjir
Industri kerajinan rumah tangga dan gula aren	Cuaca ekstrem
	Kriminalitas

Pemanfaatan lahan dan status masih bermasalah di wilayah Poli-Polia karena pemetaan lahan yang masih belum diperbaharui oleh pihak terkait untuk menentukan batas-batas hutan. Upaya penyelesaian status hutan dan lahan hutan telah dilakukan oleh masyarakat ke BPDAS Sampara untuk mendorong perhutanan sosial di masyarakat. Strategi konservasi dan penghidupan yang dikembangkan ini harus sejalan dengan upaya penyelesaian masalah dan mengarah ke isu dan permasalahan yang penting bagi masyarakat. Dari analisis KKPA/SWOT, akses untuk penggunaan lahan yang berstatus lahan negara di Poli-Polia muncul sebagai bagian dari “kelemahan”, sementara kekayaan alam di Poli-Polia seperti hasil hutan kayu dan sumber air muncul sebagai kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam strategi pengelolaan lahan, masyarakat harus terlibat dalam upaya perlindungan demi keberlanjutan kekayaan alam (hasil hutan) dan jasa lingkungan (air) di Poli-Polia, sementara perlu juga diperhatikan hak-hak pemanfaatan lahan untuk kelangsungan hidup mereka. Peluang yang telah diidentifikasi seperti potensi ekowisata,

industri kerajinan dapat menjadi acuan bentuk-bentuk kerja sama bagi masyarakat dan pengelola Poli-Polia untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta jasa lingkungan mikro hidro.

3. STRATEGI KONSERVASI DAN PENGHIDUPAN

Strategi penghidupan dan konservasi yang dibangun di Poli-Polia adalah untuk melihat perubahan pada pelaku dalam usaha-usaha pengelolaan bentang lahan dan jasa lingkungan terkait melalui aksi yang memastikan keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat. Isu ini berkembang karena adanya penggunaan lahan kawasan hutan dan pengelolaannya oleh masyarakat yang dapat berakibat konflik jika tidak ditata dengan baik. Pembangunan isu strategi ini secara umum dilakukan dengan pendekatan *outcome mapping* (Deprez, et al., 2010).

KOTAK 2: Pemetaan Capaian (*Outcome Mapping*)

Pemetaan Capaian (*Outcome Mapping/OM*) adalah suatu pendekatan untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari suatu inisiatif terhadap perubahan social. Metode ini dikembangkan oleh International Development Research Centre (IDRC) di Kanada. Pada tingkat praktis, OM merupakan satu set perangkat dan petunjuk untuk mengarahkan suatu kegiatan program untuk mewujudkan kerja sama menuju perubahan dan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diinginkan. Capaian capaian diukur dari perubahan perilaku, tindakan dan hubungan antar individu, kelompok atau organisasi yang bekerja sama secara langsung dan yang berusaha dipengaruhi oleh inisiatif tersebut.

3.1. VISI DAN MISI

Visi Poli-Polia adalah ‘terwujudnya lingkungan lestari dan kehidupan yang makmur berbasis tata kelola sumber daya alam yang berkearifan lokal’.

Misi Poli-Polia adalah ‘menjaga wilayah daerah tangkapan air sebagai penyangga sumber kehidupan dan usaha produktif rakyat untuk berkebun dan bersawah’.

3.2. MITRA LANGSUNG DAN MITRA STRATEGIS

Dalam pengembangan strategi, mitra terkait di wilayah kerja, baik mitra langsung dan mitra strategis, harus diidentifikasi dengan seksama. Mitra langsung adalah individu, kelompok, dan organisasi yang berinteraksi dengan program secara langsung untuk menciptakan perubahan dan mengantisipasi kesempatan untuk memberikan pengaruh serta terlibat dalam pembelajaran bersama. Peran mitra strategis adalah untuk membantu mencapai hasil tersebut, dan para mitra ini tidak diharapkan akan dipengaruhi oleh program yang dibangun.

Mitra langsung untuk strategi penghidupan dan konservasi ini terdiri dari individu-individu yang mewakili kelompok atau institusi: 1) memiliki peran otoritas di Poli-Polia, 2) mengelola lahan dan 3) memanfaatkan jasa/ekosistem hutan. Mitra Langsung yaitu Dinas Kehutanan/KPHP Unit XII Ladongi, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan), KWTH (Kelompok Wanita Tani Hutan) Meppokoaso, dan Kelompok Tani Hutan Bina Mahawana. Mitra strategis yang memberikan masukan dan saran untuk pengembangan strategi serta memfasilitasi kegiatan adalah BAPPEDA, kecamatan yang ada di lokasi kegiatan Kolaka Timur dan LSM lokal: Komunitas Teras dan Yayasan OWT.

Mitra yang sudah diidentifikasi membentuk kelompok dan diresmikan menjadi kelompok kerja atau Pokja. Pembentukan Pokja bertujuan untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan mitra dalam pengembangan strategi dalam penyusunan program dan proses-proses lanjutannya untuk pelaksanaan di lapangan (lihat Lampiran 1).

3.3. TARGET CAPAIAN

Target capaian menjelaskan kontribusi tiap mitra langsung kepada visi Poli-Polia dan tantangan ini mencerminkan perubahan yang diharapkan dari setiap mitra langsung. Target capaian ini juga menjadi acuan untuk merancang kegiatan kegiatan yang tepat di dalam program yang akan disusun.

Dari visi dan misi yang telah dibangun bersama, Pokja memetakan target capaian yang terangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Target capaian pada setiap mitra langsung

Mitra Langsung	Target Capaian
Dinas Kehutanan/KPHP Unit XII Ladongi	Berperan aktif dalam penyadaran dan mengembangkan program program kehutanan terhadap masyarakat petani yang ada di sekitar hutan dan daerah tangkapan air.
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Penyuluhan perkebunan kepada masyarakat dengan lebih intensif dan mensosialisasikan tanaman perkebunan bekerja sama dengan BP4K (Badan Penyuluhan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan) Kabupaten.
Kelompok Tani	Mampu membangun kerja sama dengan pemerintah dan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Pemerintahan Desa	Mempererat hubungan di masyarakat dan melakukan pembinaan langsung di tingkat desa melalui pertemuan-pertemuan kecamatan serta lebih cepat merespons pengajuan kegiatan-kegiatan penanaman pohon dari masyarakat ke dinas terkait.
BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan)	Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan penyuluhan.

3.4. PENANDA KEMAJUAN

‘Penanda Kemajuan’ adalah alat ukur untuk kemajuan dari setiap mitra langsung dalam menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik/ yang diharapkan. Penanda ini dibagi ke dalam tiga tahap: ‘respons positif awal’ sebagai penanda jangka pendek, ‘keterlibatan aktif’ sebagai penanda jangka menengah, dan ‘transformasi yang ditargetkan’ sebagai penanda jangka panjang. Tabel 4 merangkum target capaian untuk setiap mitra langsung diikuti dengan penanda kemajuan.

Tabel 4. Target capaian setiap mitra langsung dan penanda kemajuan

No	Mitra Langsung	Target Capaian	Penanda Kemajuan		
			Respons Positif Awal (Jangka Pendek)	Keterlibatan Aktif (Jangka Menengah)	Target Transformasi (Jangka Panjang)
1	Dinas Kehutanan/K PHP Unit XII Ladongi	Berperan aktif dalam penyadaran dan mengembangkan program program kehutanan terhadap masyarakat petani yang ada di sekitar hutan dan daerah tangkapan air.	Menginisiasi pertemuan atau dengan pelatihan–pelatihan yang melibatkan kelompok Tani.	Melakukan pendekatan kepada Kelompok Tani dengan sosialisasi tentang fungsi dan tata guna lahan hutan.	Menyepakati batas kelola DTA dengan masyarakat melalui skema kemitraan berbasis kebun campur dengan partisipatif.
2	Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Penyuluhan perkebunan kepada masyarakat dengan lebih intensif dan mensosialisasikan tanaman perkebunan bekerja sama dengan BP4K.	Sosialisasi perkebunan.	Melakukan pelatihan perkebunan seperti pembinaan kelompok, perbanyak tanaman, dan perawatan kebun.	Melakukan pelatihan dan proses pemasaran hasil-hasil kebun petani.
3	Kelompok Tani	Mampu membangun kerja sama dengan pemerintah dan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan.	Ikut sosialisasi yang dilakukan pemerintah baik dari kehutanan maupun perkebunan.	Menjaga pohon yang sudah ditanam di daerah tangkapan air.	Mempertahankan keberadaan pohon di sekitar DTA dan mampu membangun kesepakatan dengan pemerintah.
4	Pemerintah Desa	Mempererat hubungan di masyarakat dan melakukan pembinaan langsung di tingkat desa melalui pertemuan–pertemuan kecamatan serta lebih cepat merespons pengajuan kegiatan-kegiatan penanaman pohon dari masyarakat ke dinas terkait.	Menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak merambah hutan.	Mengundang masyarakat dan SKPD.	Mengeluarkan PERDES terhadap perlindungan hutan.
5	BP4K	Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui metode pembinaan yang lebih intensif tentang pertanian dan kehutanan.	Pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran materi penyuluhan pertanian dan kehutanan.	Pembinaan kelompok dengan membuat pertemuan dan praktek di lapangan secara rutin dan terorganisasi.	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

4. RANCANGAN DAN PROSEDUR PEMILIHAN LOKASI IMPLEMENTASI

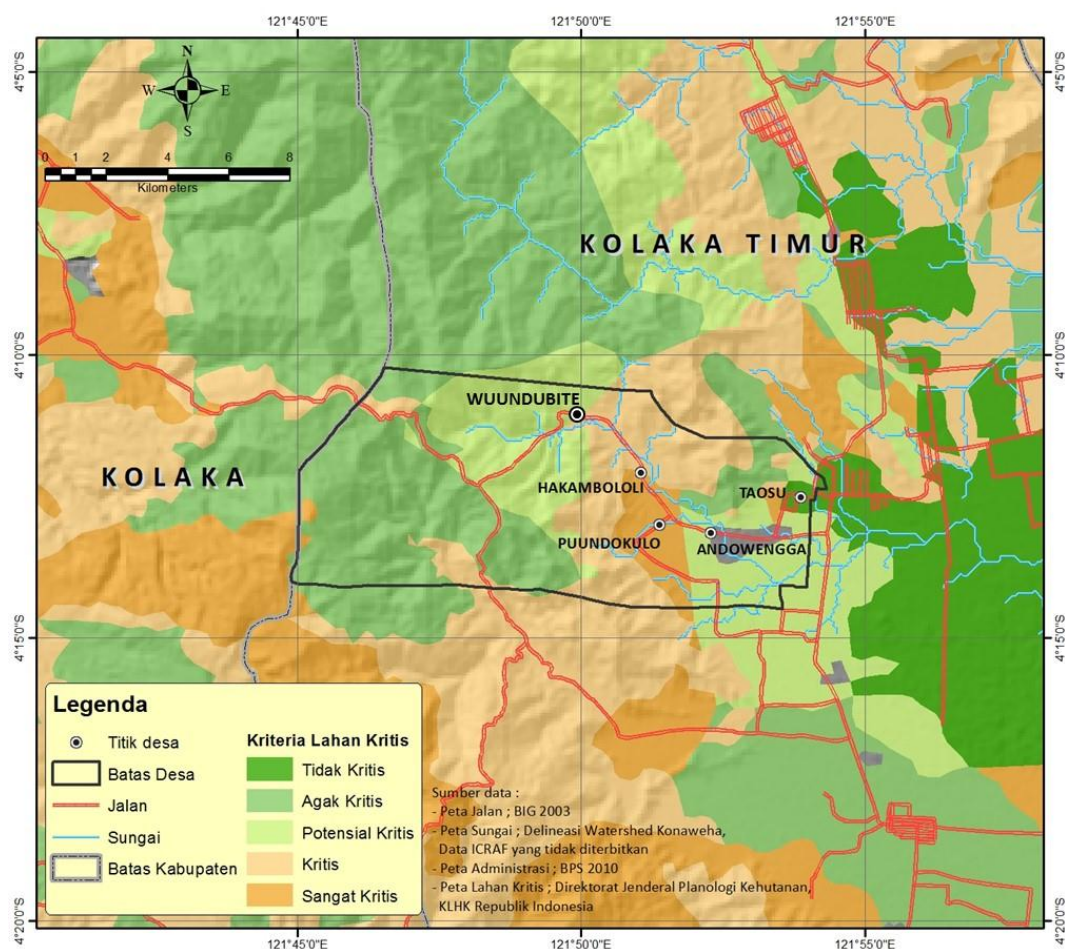
Untuk melaksanakan strategi atau misi yang disepakati (konservasi wilayah daerah tangkapan air dengan tanaman yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat) perlu dilakukan langkah-langkah yang membantu kelompok kerja menyusun rencana aksi atau program kerja untuk implementasi di lapangan. Langkah awal adalah identifikasi lokasi penanaman yang akan menjadi lokasi *pilot* dalam menjalankan misi dan identifikasi jenis-jenis tanaman yang akan ditanam. Penentuan lokasi penanaman dan jenis tanaman ini dilakukan melalui kajian terhadap data-data sekunder, survei lokasi, dan diskusi, baik diskusi dalam kelompok kerja maupun diskusi dengan kelompok masyarakat, dan dijelaskan secara singkat di bagian-bagian berikut ini.

4.1. SELEKSI DESA

Dalam proses penyusunan strategi dan perencanaan, terjadi pemekaran pada Desa Andowengga yang mengakibatkan adanya desa baru (hasil pemekaran dari Desa Andowengga) yaitu Desa Wuundubite (Gambar 5). Wilayah Desa Wuundubite merupakan hulu DTA Andowengga dan sebagian besar penduduk Desa Wuundubite berada di dalam kawasan hutan dan mengelola lahan di kawasan hutan. Wilayah Desa Wuundubite ini bersentuhan langsung dengan hutan produksi yang dikelola oleh KPHP Ladongi Unit XII. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka Desa Wuundubite ini diusulkan menjadi desa pilot untuk melaksanakan misi dan tindak lanjut perencanaannya.

4.2. PEMILIHAN LOKASI PENANAMAN

Beberapa area di Kecamatan Poli-Polia merupakan daerah lahan kritis (dapat dilihat di Gambar 5), termasuk di dalamnya adalah Desa Wuundubite yang menjadi sasaran area pilot untuk menjalankan misi yang dirancang.

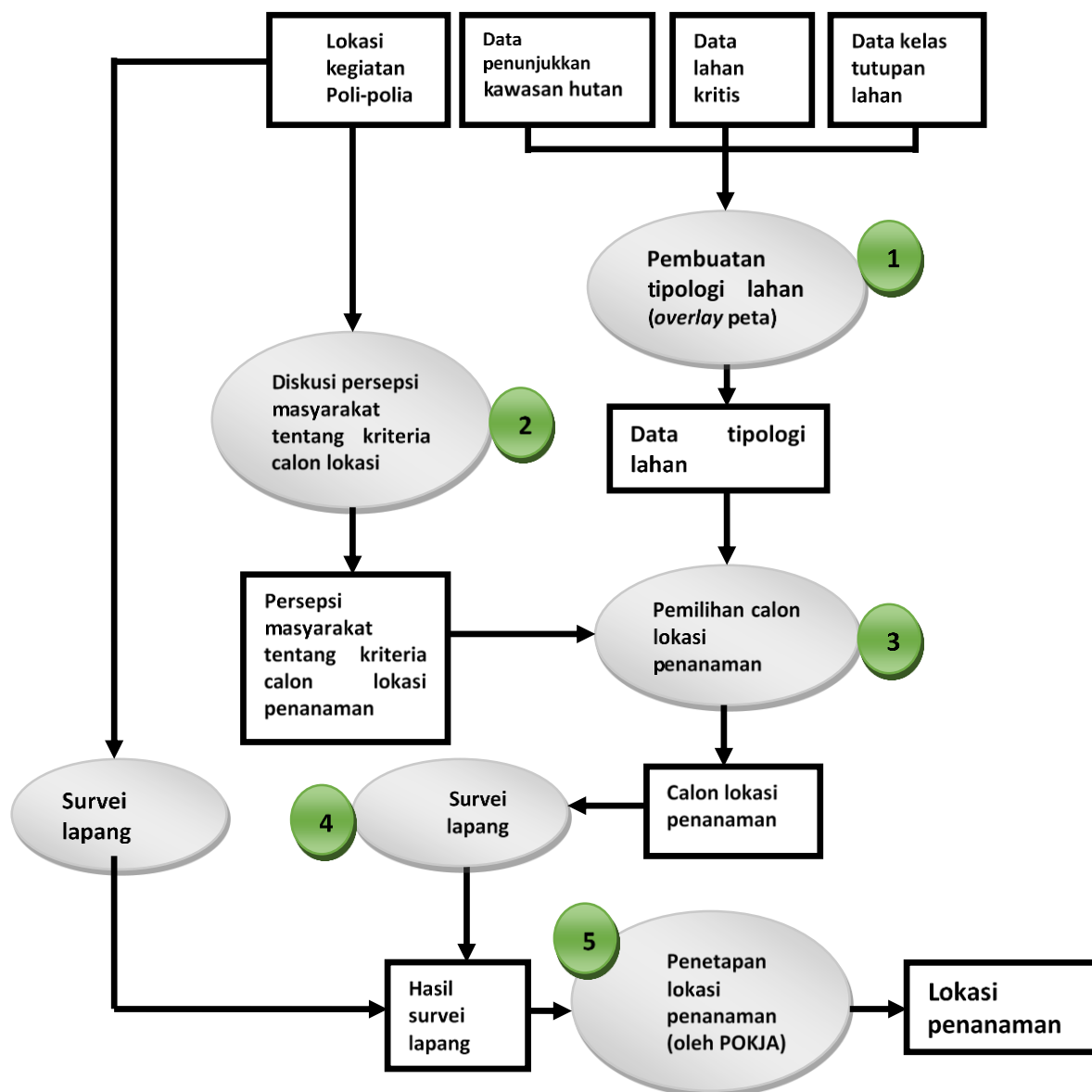


Gambar 5. Peta lahan kritis di sekitar Klaster Poli-Polia (Sumber peta lahan kritis: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan) dan lokasi Desa Wuundubite.

Untuk mendapatkan lokasi penanaman yang sesuai dengan kriteria, maka penentuan calon lokasi penanaman dikembangkan berdasarkan kriteria yang dibangun dari data spasial (peta) dan juga survei lanjutan berdasarkan persepsi masyarakat.

Secara keseluruhan, penentuan calon lokasi penanaman dilakukan melalui 5 tahap yang dirangkum dalam Gambar 6, yaitu: (1) pembuatan tipologi lahan, (2) diskusi persepsi masyarakat tentang kriteria dan prioritas calon lokasi penanaman, (3) pemilihan calon lokasi penanaman, (4) survei calon lokasi penanaman, dan (5) penetapan calon lokasi penanaman.

Berikut alur kegiatan dalam penetapan lokasi pilot lahan ‘penghidupan dan konservasi’ di Poli-Polia:



Gambar 6. Alur penentuan calon lokasi penanaman

1. Pembuatan tipologi lahan dan urutan prioritas lokasi penanaman

Pembuatan tipologi lahan bertujuan untuk mengelompokkan karakteristik lahan dengan melakukan tumpang-susun (*overlay*) terhadap tiga data spasial, yaitu data penunjukan kawasan hutan, data lahan kritis, dan data tutupan lahan. Hasil dari *overlay* tiga peta ini adalah peta tipologi lahan berdasarkan kriteria status pengelolaan lahan (kawasan hutan dan nonkawasan hutan), tingkat kekritisian lahan, dan jenis tutupan lahan. Selanjutnya, hasil tipologi lahan tersebut digunakan untuk membuat tiga urutan prioritas calon lokasi penanaman: Prioritas 1, Prioritas 2, dan Tidak Prioritas (Tabel 5).

2. Kriteria dan prioritas calon lokasi penanaman berdasarkan persepsi masyarakat

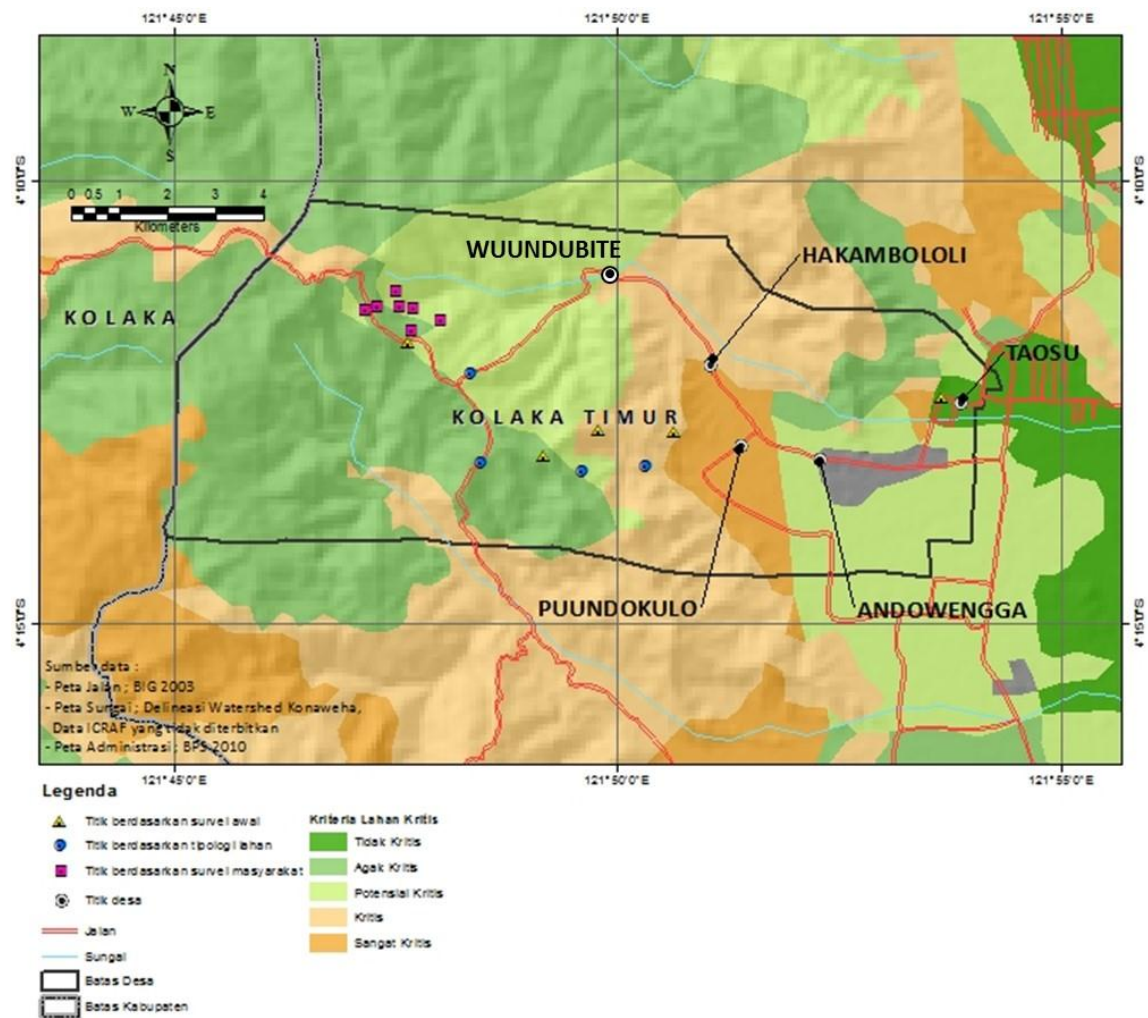
Diskusi dengan masyarakat dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kriteria calon lokasi yang sesuai untuk kegiatan penanaman, dan dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok kerja dengan masyarakat kelompok desa. Kriteria yang dipakai oleh masyarakat meliputi: tingkat produksi, jenis tutupan lahan, dan lokasi lahan (Tabel 5). Dari kriteria ini ditentukan pula urutan prioritas calon lokasi penanaman berdasarkan persepsi masyarakat.

Tabel 5. Kriteria calon lokasi penanaman

Sumber Informasi	Kriteria Lokasi	Tingkat Prioritas Lokasi Penanaman		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Tidak Prioritas
Overlay Peta dan Data Sekunder	Kawasan Hutan	Areal penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP), hutan produksi konversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT).	Areal penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP), hutan produksi konversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT).	Hutan lindung (HL).
	Lahan Kritis	Sangat kritis, kritis.	Potensial kritis, agak kritis.	Tidak kritis.
	Kelas Tutupan Lahan	Lahan terbuka, tanaman semusim, sawah, permukiman, semak belukar.	Lahan terbuka, tanaman semusim, sawah, permukiman, semak belukar.	Hutan, agroforestri, monokultur, badan air.
Persepsi Masyarakat	Kelas Tutupan Lahan	Tidak ada tanaman semusim, lahan kosong.	Tidak ada tanaman semusim, lahan kosong.	Kelas tutupan lahan dengan tanaman produktif.
	Tingkat Produksi	Rendah	Rendah	Sedang - Tinggi
	Lokasi Lahan	Sempadan sungai, lahan miring dekat dengan pemukiman.	Sempadan sungai, lahan miring dekat dengan pemukiman.	Bukan sempadan sungai, jauh dari pemukiman.

3. Pemilihan calon lokasi penanaman berdasarkan kriteria yang dibangun

Pemilihan calon lokasi penanaman yang representatif dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tipologi lahan dan persepsi masyarakat. Berdasarkan pemilihan calon lokasi penanaman dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas, di Desa Poli-Polia terdapat 11 calon lokasi penanaman yang terdiri dari: empat calon lokasi berdasarkan data tipologi lahan dan tujuh berdasarkan persepsi masyarakat (Gambar 7).



Gambar 7. Sebelas (11) titik potensi calon lokasi penanaman berdasarkan data sekunder dan penilaian masyarakat

4. Survei calon lokasi penanaman

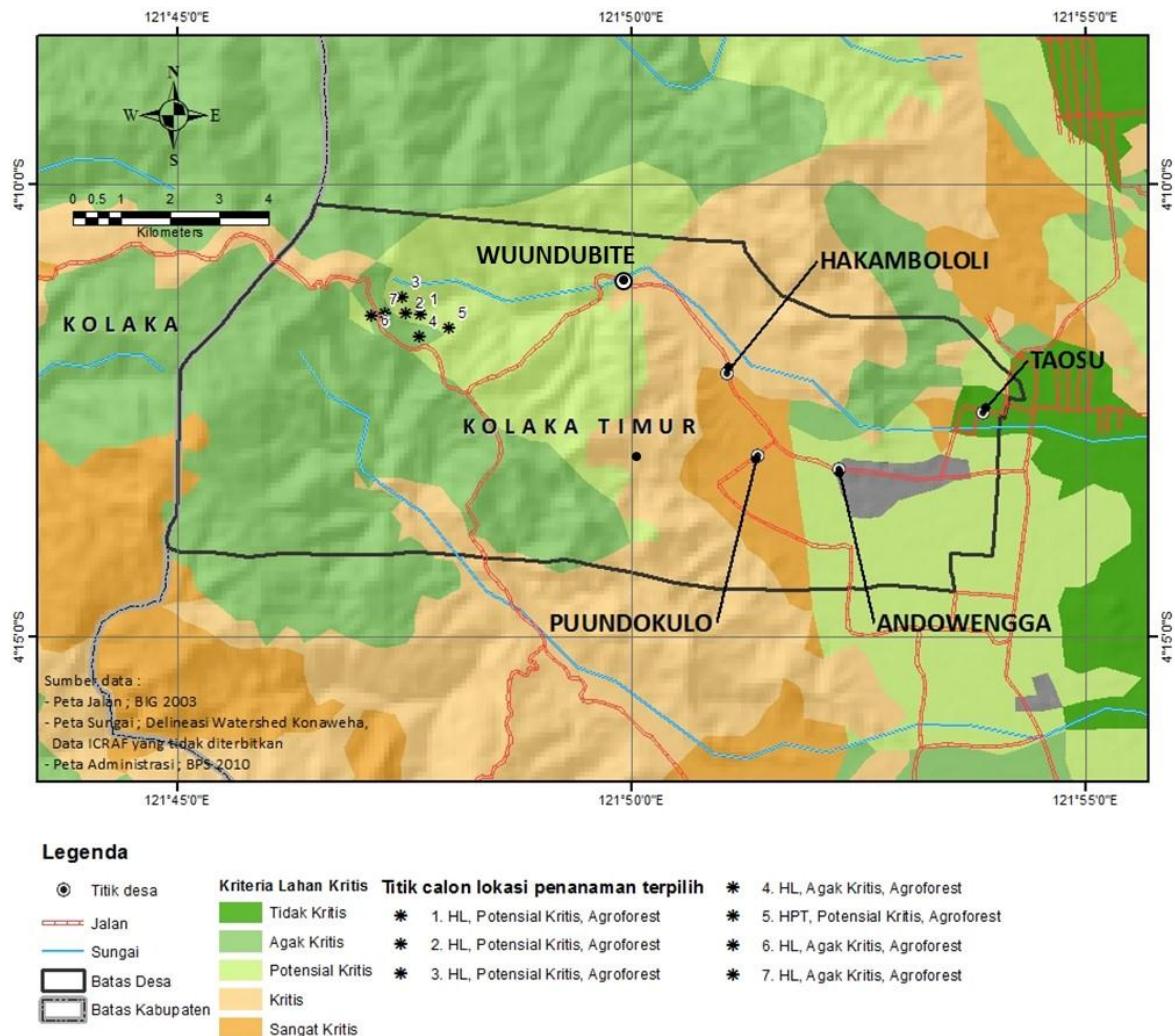
Survei terhadap calon lokasi penanaman bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lahan secara aktual dan terkini di lapangan dengan mempertimbangkan hasil survei di tahap awal dan hasil pemilihan calon lokasi berdasarkan kriteria (Tahap 3). Kondisi aktual dari calon-calon lokasi penanaman yang diobservasi meliputi tutupan lahan, kerapatan kanopi, topografi, luas lahan, dan aksesibilitas lahan (Tabel 6).

Tabel 6. Kriteria survei dan potensi calon lokasi penanaman

Kriteria Survei	Potensi Calon Lokasi Penanaman	
	Potensial	Tidak Potensial
Kelas Tutupan Lahan	Lahan terbuka, tanaman semusim, monokultur, sawah, permukiman, semak belukar.	Hutan, agroforestri, badan air.
Kerapatan Kanopi	Rendah ($\leq 40\%$).	Sedang - tinggi ($> 40\%$).
Topografi	Berbukit.	Datar, landai
Luas Lahan	Luas ≥ 2 hektar.	Luas ≤ 2 hektar.
Aksesibilitas	Mudah dijangkau.	Sulit dijangkau.

5. Penetapan calon lokasi penanaman

Penetapan calon lokasi penanaman ini merupakan tahap final pemilihan lokasi berdasarkan analisa data dan kunjungan di lapang. Dari 11 calon lokasi penanaman di tahap tahap awal, didapatkan tujuh calon lokasi penanaman yang terletak di Desa Taosu dan Desa Wuundubite/Andowengga (Gambar 8). Meskipun calon lokasi penanaman sudah ditetapkan, masih diperlukan diskusi di tingkat kelompok kerja, di tingkat masyarakat, dan terkait dengan kepemilikan lahan.



Gambar 8. Tujuh (7) titik calon lokasi penanaman terpilih

4.3. SKEMA YANG POTENSIAL

Melalui Permenhut P.39/Menhut-II/2013 tentang kemitraan kehutanan dan Permenhut P.47/Menhut-II/2013 tentang pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, KPHP Unit XII Ladongi memiliki potensi untuk bermitra dengan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dengan pola kemitraan. Pola kemitraan akan didorong melalui kelompok tani hutan yang ada di desa; dalam hal ini yang sudah mendapat pendampingan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Kemitraan yang akan didorong berupa pengelolaan lahan agroforestri berbasis pohon aren di sekitar hulu DTA Andowengga. Kemitraan ini dirancang akan berada pada blok pemberdayaan di KPHP Unit XII Ladongi.

5. TINJAUAN KEGIATAN LANJUTAN

Untuk menuju ke tahapan implementasi dalam bentuk skema kolaborasi antar pihak, perlu dilakukan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai pendekatan dan juga lembaga/instansi terkait. Secara umum tinjauan kegiatan itu dirangkum sebagai berikut:

1. Studi sosial untuk memetakan kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat sebagai bahan membangun model pendekatan sosial.
2. Sosialisasi lanjutan untuk memastikan kesepahaman tujuan kegiatan yaitu pengayaan keanekaragaman hayati hutan. Salah satu yang bisa menjembatani perbedaan kesepahaman adalah pelatihan resolusi konflik yang merupakan hal penting mengingat adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pemahaman mengenai kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, lokasi penanaman, dan lahan-lahan yang dianggap kritis. Menindaklanjuti pelatihan ini, langkah-langkah resolusi konflik juga perlu dilakukan sekiranya ditemui pihak-pihak yang belum memiliki kesepahaman.
3. Penguatan kapasitas oleh dinas-dinas lain bagi petani dalam pertanian, pembibitan, dan keterampilan, pengelolaan DTA di sekitar lahan agroforest dan hutan, termasuk untuk konservasi tanah pada daerah miring.
4. Penguatan kelembagaan kelompok melalui pendampingan yang intensif mengingat perbedaan tingkat pemahaman yang sangat beragam mengenai konsep pengelolaan kawasan hutan.
5. Kegiatan pembibitan dan penanaman dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Hortikultura Kolaka Timur bagi petani baik pertanian, pembibitan, pengelolaan kebun campur dan hutan, termasuk untuk perlindungan tanah-tanah miring yang ada di sekitar DTA.

6. PENUTUP

Strategi penghidupan masyarakat dan konservasi lingkungan yang disusun untuk Klaster Poli-Polia telah menghasilkan visi, misi, target capaian, dan diakhiri dengan tahapan-tahapan perencanaan untuk wilayah desa pilot, yaitu Desa Wuundubite. Seperti telah dirangkum di bagian akhir dokumen ini, proses-proses yang melibatkan para pihak untuk berkolaborasi merupakan proses-proses yang penting untuk ditindaklanjuti. Pada akhirnya, strategi yang ditulis ini hanya merupakan titik awal untuk para pihak berproses lebih lanjut yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap visi yang sudah dibangun bersama.

7. REFERENSI

Department for International Development (DFID). 1999. Sustainable Livelihood Guidance Sheet. <http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf> (last accessed 20 October 2014)

Earl S, Carden F, and Smutylo T. 2001. Outcome Mapping – Building Learning and Reflection into Development Programs. International Development Research Centre, Ottawa.

Kecamatan Poli-Polia Dalam Angka. 2011. Badan Pusat Statistik, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

“SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.” *Chapter 3. Assessing Community Needs and Resources*. http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1049.aspx (last accessed 21 October 2014)

World Agroforestry Centre-ICRAF Southeast Asia. 2014. Profil Klaster Poli-polia (Andowengga, Taosu, Hakambololi, Puundokulo), Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. World Agroforestry Centre – ICRAF Southeast Asia Regional Office. Bogor, Indonesia

LAMPIRAN 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) KLASER POLI-POLIA



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 10045/277 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI PENGHIDUPAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur memiliki nilai – nilai strategis yang perlu dikelola secara arif, bijaksana serta berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai – nilai strategis tersebut, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja (POKJA) strategi penghidupan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Penghidupan Berwawasan Lingkungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1522);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50590);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI PENGHIDUPAN BERWAWASAN LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Strategi Penghidupan Berwawasan Lingkungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan studi lapangan untuk penyusunan strategi penghidupan berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. Melakukan penyusunan dokumen strategi penghidupan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Kelompok Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur melalui Instansi Teknis Terkait;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada lembaga Agfor Sulawesi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada DPA-SKPD BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur dan Biaya lain berasal dari lembaga lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 1 September 2016


BUPATI KOLAKA TIMUR,
H. TONY HERBIANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur di Loea
2. Inspektur Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 10045 / 277 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 September 2016

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI PENGHIDUPAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) STRATEGI PENGHIDUPAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- A. Pelindung Penasihat : 1. Bupati Kolaka Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
3. Kapolres Kolaka-Kolaka Timur
- B. Tim Kerja Pengelolaan Bersama Poli-polia
1. Pembina : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Ketua Pokja : Usman (Staf Kecamatan Poli-polia)
3. Wakil Ketua : Selamat (Penyuluh Swadaya Kec. Poli-polia)
4. Sekretaris : Hasriadi (Sekretaris Desa)
5. Wakil Sekretaris : Firdaus (Penyuluh Swadaya)
6. Anggota/ Team Lapangan : 1. Andi Makmur (Tokoh Masyarakat)
2. Gusti Kusuma A.Md. (OWT-AGFOR)
3. Abraham (Tokoh Masyarakat)
4. Juwaeri (KWTH Meppokoaso)
5. Sukriadi (Penyuluh Perkebunan)
6. Moh. Rizal Gani, SE. M.Si (Bappeda Koltim)
7. Jhon Roy Sirait, S.TP (ICRAF-AGFOR)
8. Imran Tumora (TERAS-AGFOR)
9. Daniel (Kehutanan Koltim)

10. Made Lumiyana (BP4K Koltim)
11. La Ode Diarra, S.Hut (KPH-P Unit XII
Ladongi)
12. Rahima (Tokoh Masyarakat Wundubite)
13. Tawang (KTH Bina Mahawana)

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**
NH. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN 2. HASIL IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN DAN SOSIALISASI

Selama pembentukan strategi sudah dilakukan beberapa kegiatan awal bersama pokja dan mitra lainnya, yaitu survei cek kondisi lapangan dan verifikasi langsung serta sosialisasi yang dijabarkan di Tabel Lampiran 2 di bawah ini:

Tabel Lampiran 2. Hasil identifikasi data lapangan dan sosialisasi kehutanan

Kegiatan	Deskripsi
Identifikasi Sumber Air dan Aliran Sungai	Dari hasil identifikasi di lapangan, terdapat 25 aliran sungai kecil atau sub-DAS serta empat mikrohidro yang terdiri dari 1 pakai turbin dan 3 pakai kincir air, serta pipanisasi air. Jarak dari induk desa ke sumber air sekitar 7 km dan jarak dari desa ke mikrohidro sekitar 9 km. Adapun tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui bahwa sebagai kawasan daerah tangkapan air juga merupakan sebagai bagian dari sumber penghidupan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi sawah, dan air minum. Sumber air ini melintasi kebun-kebun warga sehingga tidak menyulitkan warga untuk menggunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari.
Sosialisasi Kehutanan	Hasil diskusi yang dilakukan di desa dengan melibatkan aparat desa, KPHP UNIT XII Ladongi, Dinas Kehutanan, dan LSM OWT dan Teras bertujuan untuk menyampaikan dan berbagi informasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan produksi, dalam hal ini pada blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan. Kepala Desa Wuundubite, Kamaruddin, mengajak masyarakatnya untuk menanam lahan kosong atau pada kemiringan lebih dari 30°. Perwakilan dari KPHP Unit XII Ladongi, Aguslan, mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak KPHP Unit XII untuk menjaga hutan tetapi tetap mengedepankan peningkatan ekonomi. Aren merupakan salah satu komoditi unggulan yang akan didorong oleh pihak KPHP Unit XII Ladongi sebagai bentuk pendampingan kelompok. Sedangkan pihak Kelompok Tani Hutan (KTH) meminta NGO/LSM untuk memperkuat kelompok dan kelembagaannya sebagai wadah berkumpul dan memfasilitasi keabsahannya di desa dan kecamatan. Hal ini diungkapkan Tawang, ketua KTH Bina Mahawana di Desa Wuundubite.
Sosialisasi Penyuluhan dan Perkebunan	Hasil sosialisasi penyuluhan dari BP4K, diwakili oleh Daniel, M.Si, akan selalu dikoordinasikan dengan pihak KPHP Unit XII Ladongi, terutama di daerah kawasan hutan. BP4K merencanakan secepatnya akan melakukan pelatihan pengolahan aren di kelompok tani untuk meningkatkan kualitas dan kemasan yang baik. Dinas Perkebunan sedang mendorong kawasan sayur-sayuran seluas 40 ha, terutama di Desa Andowengga.
Identifikasi Tanaman atau Pepohonan yang Ditanam Masyarakat di Lahan DTA	Pohon asli yang ditanam adalah eha, ponto, bitti, kayu besi, jati lokal, gamal, dan pohon jambu. Tanaman MPTS adalah cengkeh, aren, kelapa, kakao, kemiri, merica, rambutan, langsung, dan durian. Adapun tujuan identifikasi ini adalah untuk mengetahui tanaman yang menghasilkan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat petani di Poli-Polia. Lebih dari 500 batang pohon lokal, yang merupakan bantuan dari pemerintah dan hasil swadaya masyarakat, sudah ditanam di sekitar aliran sungai. Kegiatan penanaman ini dilakukan sejak tahun 2002 sampai sekarang.
Komunikasi dan Kelembagaan	Berdasarkan hasil diskusi kelompok tani dan tokoh tokoh masyarakat, beberapa masukan yang diusulkan dalam kegiatan ini adalah penggunaan bahasa lokal saat sosialisasi dan pemaparan program karena ada anggota masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami tujuan dan kegiatan program jika disampaikan dalam bahasa Indonesia. Penyampaian dalam bahasa setempat akan lebih mudah diserap dan dimengerti oleh warga atau kelompok tani.



Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada (sebelumnya dikenal dengan nama Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada). Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre.

**World Agroforestry Centre
Southeast Asia Regional Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia
blog.worldagroforestry.org